



Scoping Review: Pemberdayaan dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tracy Meloh¹, Trivena Sumangkut², Teresa Kodoati³, Reygina Salindeho⁴

Universitas Negeri Manado

Received: 20 Mei 2026
Revised: 29 Mei 2026
Accepted: 11 Juni 2026

Abstrak

Pemberdayaan merupakan elemen penting dalam paradigma rehabilitasi sosial modern yang menempatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebagai subjek aktif dalam proses pemulihan dan peningkatan keberfungsian sosial. Namun, implementasi pemberdayaan dalam konteks rehabilitasi sosial masih menunjukkan variasi yang luas, baik dari segi jenis intervensi, kelompok sasaran, maupun pendekatan yang digunakan. Scoping review ini bertujuan untuk memetakan secara komprehensif bentuk, model, dan hasil intervensi pemberdayaan dalam rehabilitasi sosial PMKS, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung, hambatan, serta kesenjangan penelitian yang masih perlu ditindaklanjuti. Kajian ini menggunakan kerangka dalam proses penelusuran, seleksi, dan analisis literatur dari berbagai basis data nasional dan internasional tanpa batasan tahun publikasi. Hasil review menunjukkan bahwa pemberdayaan dalam rehabilitasi sosial umumnya mencakup empat domain utama, yaitu pemberdayaan psikososial, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial-komunitas, dan pemberdayaan berbasis hak. Intervensi tersebut terbukti berkontribusi pada peningkatan kapasitas diri, kemandirian ekonomi, kepercayaan diri, partisipasi sosial, serta kemampuan PMKS dalam mengakses sumber daya yang lebih luas. Faktor pendukung yang paling banyak dilaporkan meliputi keterlibatan aktif PMKS, dukungan keluarga, kolaborasi multi-sektor, dan keberlanjutan pendampingan. Sebaliknya, hambatan utama mencakup stigma sosial, keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil. Kesenjangan penelitian terutama ditemukan pada kurangnya studi evaluatif jangka panjang, model pemberdayaan berbasis teknologi, serta kajian pada kelompok PMKS tertentu. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan dan praktik rehabilitasi sosial yang lebih inklusif, berorientasi hak, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Rehabilitasi Sosial, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).*

(*) Corresponding Author:

tracymeloh@gmail.com, trivenasumangkut4@gmail.com,
teressakodoati2005@gmail.com, salindehoreygina@gmail.com

How to Cite: Meloh, T., Sumangkut, T., Kodoati, T., & Salindeho, R. (2026). Scoping Review: Pemberdayaan dalam Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.B), 179-190. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13322>.

PENDAHULUAN

Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan perkembangan kapasitas individu yang merupakan suatu upaya sistematis untuk memulihkan kemampuan seseorang dalam menjalankan peran sosialnya secara optimal di dalam masyarakat. Melalui proses ini, individu dibantu untuk memperoleh kembali fungsi sosialnya, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta berpartisipasi secara produktif dalam kehidupan sosial. (INDONESIA, 2017)

Kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menghadapi berbagai hambatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, pelaksanaan tanggung jawab sosial, serta akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak dan produktif. Di berbagai daerah di Indonesia, permasalahan PMKS masih bersifat kompleks dan multidimensional. Meskipun pemerintah telah melakukan beragam intervensi, upaya tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi akar permasalahan yang dihadapi kelompok ini. Kondisi ketidakmampuan sebagian penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasarnya secara efektif mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam jangkauan maupun efektivitas bantuan sosial negara. (Nagaring et al., 2021).

Kelompok ini meliputi penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar, korban kekerasan, penyalahguna NAPZA, gelandangan, keluarga miskin, dan berbagai kelompok rentan lainnya. Kompleksitas masalah yang dihadapi PMKS umumnya bersifat multidimensional, mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan struktural. Oleh karena itu, upaya penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, rehabilitasi sosial berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memulihkan fungsi sosial, memperkuat kapasitas personal, serta memperluas peluang bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada pemulihan individu, tetapi juga menjadi mekanisme strategis yang mendorong penyediaan layanan informasi, konsultasi, serta koordinasi lintas sektor dan intra-sektor dalam penanganan persoalan kesejahteraan sosial. Adapun kelompok PMKS mencakup berbagai kategori rentan, antara lain tunawisma, tunawisma psikotik, pengemis, anak jalanan, serta pekerja seks komersial, yang masing-masing memerlukan intervensi sosial yang komprehensif dan berkelanjutan. (Aswidiyanto & Soedjarwo, 2023)

Mengingat pentingnya rehabilitasi dalam dimensi sosial yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, hak setiap individu untuk hidup serta terbebas dari ancaman bahaya narkoba harus dipahami sebagai bagian dari pemenuhan hak fundamental. Rehabilitasi diposisikan sebagai upaya efektif dalam mencegah penyalahgunaan berkelanjutan pada individu dengan ketergantungan narkoba, sekaligus memfasilitasi pemulihan fungsi kognitif, emosional, dan perilaku. Pemulihan ini menjadi indikator perubahan yang diperlukan untuk mengembalikan komponen kepribadian yang adaptif, sehingga individu mampu berinteraksi secara sehat dan produktif dengan lingkungan sosialnya, khususnya dalam konteks lingkungan rehabilitasi. (Nagaring et al., 2021)

Rehabilitasi merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memulihkan kondisi penyandang disabilitas, yang dapat dilakukan melalui pendekatan fisik, mental, maupun sosial, sehingga individu mampu mengembangkan kapasitasnya secara optimal (Salsabila et al., 2019).

Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kapasitas individu yang mengalami gangguan fungsi sosial, sehingga mereka mampu menjalankan peran serta tanggung jawab sosialnya secara tepat dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat. (Murni & Astuti, 2015)

Upaya rehabilitasi diarahkan untuk memulihkan harga diri, kepercayaan diri, serta kesadaran dan tanggung jawab individu terhadap masa depan dirinya, keluarga, dan lingkungan

sosialnya. Selain itu, rehabilitasi juga bertujuan mengembalikan motivasi dan kemampuan individu untuk melaksanakan fungsi sosialnya secara efektif. (RAMADHANI et al., 2017)

Rehabilitasi sosial merupakan salah satu ranah praktik dalam pekerjaan sosial yang berorientasi pada pemulihan fungsi sosial individu maupun kelompok rentan. Adapun fungsi utama pekerjaan sosial mencakup peningkatan kapasitas individu dalam menghadapi berbagai kesulitan, pengidentifikasian serta pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungan klien, penguatan jejaring layanan sosial, serta advokasi keadilan sosial melalui perumusan dan pengembangan kebijakan sosial yang responsif (Wibhawa, 2010). Meskipun konsep pemberdayaan telah banyak diadopsi dalam kebijakan dan praktik rehabilitasi sosial di berbagai negara, implementasinya sangat beragam. Perbedaan konteks sosial, kelompok sasaran, model intervensi, dan dukungan kelembagaan menghasilkan variasi dalam efektivitas intervensi pemberdayaan. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam memahami bagaimana pemberdayaan diterapkan secara nyata, faktor apa yang mendukung keberhasilannya, hambatan yang sering muncul, serta sejauh mana intervensi tersebut memberikan dampak jangka panjang bagi PMKS.

Dalam situasi ini, pendekatan *scoping review* menjadi relevan untuk memetakan cakupan bukti ilmiah yang tersedia mengenai pemberdayaan dalam rehabilitasi sosial bagi PMKS. *Scoping review* memungkinkan peneliti mengidentifikasi berbagai bentuk intervensi, menganalisis pendekatan yang digunakan, mengeksplorasi faktor pendukung dan penghambat implementasi, serta memetakan kesenjangan penelitian yang masih perlu ditindaklanjuti. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik pemberdayaan dalam layanan rehabilitasi sosial, tetapi juga memberikan masukan penting bagi penguatan kebijakan, pengembangan program, serta praktik pekerjaan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

METODE

Scoping review: Tinjauan lingkup meliputi serangkaian tahapan yang sistematis, yaitu: (1) mengidentifikasi isu penelitian, (2) menelusuri studi yang relevan, (3) memilih artikel penelitian yang memenuhi kriteria inklusi, (4) menyusun dan memetakan data dalam bentuk grafik, serta (5) mengintegrasikan, meringkas, dan melaporkan temuan. (Aan Nuraeni, 2021)

Scoping review ini difokuskan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana bentuk, model, dan pendekatan pemberdayaan yang diterapkan dalam rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); apa saja faktor pendukung serta hambatan yang memengaruhi implementasi program pemberdayaan dalam konteks layanan rehabilitasi sosial; dan bagaimana dampak intervensi pemberdayaan terhadap kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS serta kesenjangan penelitian yang masih tersisa.

Scoping review untuk mengidentifikasi langkah-langkah menyusun protokol penelitian. Metode tinjauan lingkup menguraikan prosedur konseptual yang diperlukan dalam merancang langkah-langkah penelitian secara komprehensif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan berbagai sumber referensi, termasuk jurnal ilmiah dan situs web resmi pemerintah. Dalam konteks penelitian, tinjauan lingkup berfungsi sebagai proses eksplorasi literatur secara luas dan mendalam guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengetahuan yang tersedia (Widiasih et al., 2020)

Sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan dari *scoping review* ini adalah untuk memetakan ragam intervensi pemberdayaan yang digunakan dalam proses rehabilitasi sosial, mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat maupun menghambat keberhasilan program pemberdayaan di berbagai konteks layanan, serta merangkum temuan mengenai dampak pemberdayaan terhadap kondisi psikososial, ekonomi, dan sosial-komunitas PMKS sekaligus mengungkap celah penelitian yang dapat menjadi dasar pengembangan studi dan kebijakan rehabilitasi sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan

Analisis

Analisis data dilaksanakan melalui penyusunan tabel ekstraksi data sebagai dasar pengelompokan dan penelaahan temuan penelitian. Setelah merumuskan ringkasan temuan secara sistematis, serta menyajikan laporan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini memastikan bahwa proses analisis berlangsung terstruktur, komprehensif, dan konsisten dengan kerangka metodologis penelitian.

Tabel 1.1 Ekstraksi Data

No.	Author (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
1.	(Aswidiyanto & Soedjarwo, 2023)	Peran Instruktur Dalam Pelatihan Keterampilan Sulam Di Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjointstad	Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data berupa koleksi data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan	Penelitian ini menghasilkan lima poin utama. Instruktur berperan sebagai pelatih yang menguasai materi, pembimbing keterampilan, fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar kondusif, serta motivator bagi penerima manfaat. Pelatihan didukung oleh sarana prasarana dan profesionalisme instruktur, namun masih terkendala terbatasnya pemasaran hasil karya dan sulitnya komunikasi dengan penerima manfaat.
2.	(RAMADHANI et al., 2017)	Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (Brskw) Palimanan Kabupaten Cirebon	Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data.	Rehabilitasi sosial terhadap portitusi adalah masalah sosial yang semakin kompleks. Hal tersebut dipicu oleh beberapa faktor, seperti faktor kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan tidak memiliki keahlian. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan adalah dengan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial ini bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian para eks WTS ke lingkungan sosialnya, selain itu rehabilitasi juga

				bertujuan untuk memberikan keterampilan dan keahlian pada para WTS agar tidak kembali pada dunia prostitusi.
3.	(Murni & Astuti, 2015)	Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita	Analisis data deskriptif kualitatif	Hasil pelaksanaan rehabilitasi menunjukkan adanya perubahan yang berarti pada sikap dan perilaku penerima manfaat. Hal ini tercermin dari: a) meningkatnya kemampuan penerima manfaat dalam melakukan interaksi sosial dengan lingkungan, khususnya dengan keluarga, seperti dapat diajak berkomunikasi, bersedia membantu pekerjaan rumah tangga, mampu bertegur sapa dengan orang lain, serta mulai membiasakan diri mengucapkan salam dan terima kasih, sekaligus memiliki pemahaman mengenai kondisi dirinya yang sedang sakit; b) meningkatnya pemahaman keluarga terhadap kondisi penyandang disabilitas mental, sehingga komunikasi antara keluarga dan penerima manfaat menjadi lebih efektif serta keluarga mampu memahami dan memenuhi kebutuhan penerima manfaat dengan lebih baik.
4.	(Sutarto, 2021)	Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap	Metode Kualitatif dan deskriptif terhadap fenomena	Unsur pertama dan paling mendasar adalah unsur filosofis yang berorientasi pada prinsip kebenaran dan keadilan,

		Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pidanaan Relatif	konseptual hukum.	serta unsur sosiologis yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Meskipun demikian, putusan hakim yang memberikan vonis rehabilitasi patut diapresiasi, karena hakim memandang penyalahguna narkotika sebagai individu yang sedang sakit dan memerlukan penanganan kesehatan, sehingga lembaga pemasyarakatan bukanlah tempat yang tepat bagi mereka.
5.	(Panggabean & Jarodi, 2023)	Analisis Program Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan	Metode kualitatif dan secara observasi atau pengamatan langsung di lapangan dan juga didapatkan dengan melakukan wawancara kepada informan	Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rehabilitasi bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas I Medan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman. Selain itu, Lapas Kelas I Medan juga menyelenggarakan Program Rehabilitasi Sosial yang menerapkan modalitas terapi <i>Therapeutic Community</i> sebagai bagian dari proses pemulihan.
6.	(Iglesias et al., 2024)	Accessibility Evaluation of an Assistive Social Robotic Platform for Rehabilitation and Its Improvement by Means of Haptic Devices	Kuantitatif dan Kualitatif	Pedoman penggunaan perangkat haptik yang aksesibel telah disusun, dan sebuah perangkat haptik berbiaya rendah untuk rehabilitasi lengan atas telah diusulkan. Prototipe pertama berhasil diintegrasikan ke dalam Inrobits Rehab, dan evaluasi awal dilakukan pada pengguna yang mensimulasikan

				gangguan penglihatan dan pendengaran sementara.
7.	(Dinardo, 2019)	Peran Pekerja Sosial Dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta	Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif.	valuasi akhir terhadap layanan rehabilitasi sosial menunjukkan bahwa: (1) klien dilibatkan dalam kegiatan Praktik Belajar Kerja; (2) pekerja sosial menjalankan berbagai peran penting, termasuk sebagai motivator, pendamping, mediator, serta penghubung; (3) pelayanan program rehabilitasi sosial didukung oleh beberapa faktor, seperti ketulusan pekerja sosial dalam memberikan layanan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.
8.	(Ceja-Vega et al., 2025)	Impact of methamphetamine abstinence on social cognition and oxytocin regulation: A study in patients undergoing rehabilitation	Metode Kuantitatif dan pengambilan sampel. Sampel terdiri dari 25 partisipan pria berusia 18 hingga 35 tahun yang tinggal di pusat rehabilitasi. Kriteria inklusi mensyaratkan riwayat gangguan penggunaan metamfetamin yang terdokumentasi selama minimal satu tahun.	Kesimpulannya, hasil menyoroti defisit kognitif sosial yang persisten dan disregulasi oksitosin pada pengguna metamfetamin selama masa abstinensi, yang menggarisbawahi perlunya intervensi yang terarah. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengeksplorasi pendekatan pengobatan komprehensif yang mengatasi gangguan kognitif sosial dan menggabungkan terapi berbasis oksitosin untuk meningkatkan hasil pemulihan kecanduan metamfetamin.
9.	(Aprillia et al., 2021)	Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui	Penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan	Situasi tersebut perlu segera ditangani agar pelaksanaan program pada setiap tahun dapat berjalan secara optimal,

		Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang	data observasi, hasil wawancara, serta dokumentasi.	sehingga penyandang disabilitas fisik dapat lebih mudah mencapai kesejahteraan sosial dalam kehidupan mereka.
10.	(Fajar, 2022)	Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri	Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, dan diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain	Rehabilitasi sosial bertujuan untuk membantu pecandu atau penyalahguna narkoba kembali berperan dalam masyarakat dengan memulihkan kemampuan berpikir, mengelola emosi, dan mengatur perilaku yang mencerminkan perubahan positif. Proses ini memungkinkan individu memiliki kepribadian yang sehat dan mampu berinteraksi secara wajar dengan orang lain dalam lingkungan sosial, termasuk selama masa rehabilitasi.

PEMBAHASAN

1. Konsep Pemberdayaan dalam Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

Setiap individu memiliki peran dan fungsi tertentu dalam kehidupannya, yang dijalankan melalui strategi serta pola pikir yang berbeda-beda. Variasi tersebut umumnya dipengaruhi oleh latar belakang sosial masing-masing individu. Peran merujuk pada seperangkat perilaku yang relatif seragam dan secara normatif diharapkan dari seseorang yang menempati posisi tertentu dalam suatu lingkungan sosial. (Nagaring et al., 2021)

Bimbingan keterampilan kerja merupakan proses pengembangan pengetahuan dan kemampuan bagi penyandang disabilitas mental sesuai bakat, minat, dan hasil asesmen vokasional, serta kebutuhan dunia kerja. Kegiatan ini juga melatih penerima manfaat untuk memberikan respons yang sesuai dengan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan kemampuan interaksi sosial agar mereka lebih percaya diri dalam bergaul dan mampu menjalankan peran sosial dalam keluarga maupun masyarakat. (Murni & Astuti, 2015)

Meskipun menunjukkan efektivitas, program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas fisik belum sepenuhnya mencapai potensi optimalnya. Hal tersebut tercermin dari beragamnya tugas dan peran para pelaksana program yang belum terkoordinasi secara maksimal. (Aprillia et al., 2021)

Gangguan pada fungsi eksekutif seperti memori kerja, kontrol impuls, kemampuan membuat keputusan, dan keterbatasan kognitif serta defisit dalam kognisi sosial merupakan tantangan yang sering muncul dalam proses rehabilitasi. Disfungsi tersebut dapat meningkatkan kerentanan individu terhadap kekambuhan karena menghambat kemampuan mereka untuk mengikuti program rehabilitasi yang terstruktur, memahami isyarat sosial yang

kompleks, serta berkomunikasi secara efektif dengan sistem dukungan yang tersedia. (Ceja-Vega et al., 2025)

Aspek yang masih memerlukan penguatan adalah kemampuan responden dalam mengekspresikan emosi secara verbal. Selama proses rehabilitasi, responden menunjukkan kesulitan dalam mengutarakan baik emosi positif, seperti senang dan gembira, maupun emosi negatif, seperti sedih dan marah. (Rohman et al., 2025).

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa keberfungsian peran sosial individu sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial serta kapasitas kognitif dan emosional yang dimilikinya. Program rehabilitasi sosial, termasuk bimbingan keterampilan kerja dan pelatihan interaksi sosial, berperan penting dalam meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas baik mental maupun fisik untuk menjalankan peranan sosial secara adaptif sesuai norma masyarakat. Meskipun implementasi program rehabilitasi di beberapa daerah telah berjalan cukup baik dan memiliki pembagian tugas yang jelas, efektivitasnya masih terkendala oleh gangguan fungsi eksekutif, defisit kognisi sosial, serta kesulitan individu dalam mengekspresikan emosi. Tantangan-tantangan tersebut dapat menghambat partisipasi penerima manfaat dalam proses rehabilitasi dan meningkatkan risiko kekambuhan, sehingga dibutuhkan penguatan intervensi yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap kebutuhan psikologis, sosial, dan emosional penyandang disabilitas.

2. Bentuk Intervensi dan Praktik Pemberdayaan dalam Layanan Rehabilitasi Sosial

Pendampingan kepada penyandang disabilitas dan dukungan bagi keluarga dan individu penyandang disabilitas diperlukan untuk membantu mereka menjalankan hak-haknya secara optimal. Upaya tersebut mencakup pemberdayaan individu dengan gangguan jiwa agar mampu melepaskan diri dari berbagai hambatan, memastikan mereka memperoleh sumber daya yang dibutuhkan, serta mendorong penguatan kebijakan yang berpihak pada kepentingan mereka (Murni & Astuti, 2015).

Kesesuaian atau kesetaraan antara hukuman dan tindakan rehabilitasi dengan tingkat kejahatan narkoba memberikan keuntungan dalam mengoptimalkan penerapan kedua instrumen tersebut secara proporsional. Rehabilitasi bagi pengguna narkoba bertujuan untuk memulihkan dan/atau meningkatkan kapasitas fisik, mental, dan sosial individu. Sebagaimana telah diuraikan, terdapat dua bentuk utama rehabilitasi bagi pengguna narkoba, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Fajar, 2022)

Kesejahteraan sosial yang salah satunya melalui pemberdayaan sosial dengan ujian kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya pemberdayaan sosial, adalah meningkatkan kelangsungan hidup, kualitas hidup, dan kesejahteraan individu, serta memulihkan fungsi sosial agar tercapai kemandirian (Aswidiyanto & Soedjarwo, 2023)

Tahapan-tahapan merupakan upaya tersebut diwujudkan melalui serangkaian langkah terencana, meliputi penetapan tujuan layanan yang relevan bagi klien untuk memungkinkan proses rehabilitasi yang efektif, perencanaan intervensi yang tepat, serta identifikasi sumber daya yang dapat mendukung keberhasilan rehabilitasi (Salsabila et al., 2019).

Suatu komunitas yang berfungsi sebagai keluarga pengganti merupakan lingkungan pendukung bagi individu dengan gangguan kesehatan mental atau kecanduan narkoba, tempat mereka dapat belajar membangun hubungan interpersonal yang efektif serta mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang mandiri dan produktif di masyarakat (Panggabean & Jarodi, 2023)

Secara keseluruhan, berbagai bentuk intervensi dan praktik pemberdayaan dalam layanan rehabilitasi sosial menunjukkan bahwa proses rehabilitasi tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi fisik atau mental, tetapi juga pada pemenuhan hak, pengembangan kapasitas, serta integrasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pendampingan kepada penyandang disabilitas dan keluarganya menjadi komponen penting untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar, akses layanan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak

manusiawi. Selain itu, tahapan perencanaan pelayanan, penentuan tujuan rehabilitasi, dan pemanfaatan sumber daya menjadi elemen krusial agar intervensi berjalan efektif dan terarah.

Komunitas yang berfungsi sebagai keluarga pengganti turut memperkuat proses rehabilitasi dengan menyediakan lingkungan suportif yang memungkinkan individu belajar keterampilan hidup, membangun hubungan positif, dan mempersiapkan diri untuk hidup mandiri. Dengan demikian, praktik pemberdayaan dalam rehabilitasi sosial bersifat multidimensional dan menekankan pendekatan holistik untuk memulihkan keberfungsian dan kemandirian penerima manfaat.

3. Faktor Pendukung, Hambatan, dan Dampak Pemberdayaan terhadap Kemandirian PMKS

Pelaksanaan rehabilitasi sosial berbasis komunitas dan keluarga mencakup komponen masukan, proses, faktor penghambat dan pendukung, serta manfaat yang dihasilkan bagi penyandang disabilitas mental dan keluarganya. (Murni & Astuti, 2015).

Pusat Pelayanan Sosial Darurat (PPS) memberikan layanan dasar, perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan tingkat pertama bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan disabilitas mental. Dalam konteks penelitian ini, isu PMKS difokuskan pada peran instruktur dalam penanganan pengemis sosial melalui penyelenggaraan pelatihan keterampilan (Aswidiyanto & Soedjarwo, 2023)

Meskipun berbagai langkah yang telah dilakukan belum menghasilkan dampak yang signifikan, tindakan dan kebijakan pemerintah, khususnya melalui Kementerian Sosial dan lembaga pemberdayaan masyarakat, menunjukkan adanya komitmen yang kuat dalam mengatasi permasalahan tersebut (Nagaring et al., 2021)

Kebijakan publik dalam bidang ini harus bersifat progresif, mencakup tindakan yang berorientasi ke depan disertai mekanisme tindak lanjut yang jelas. Dengan demikian, perencanaan pengelolaan narkotika perlu dirancang secara komprehensif, meliputi aspek pencegahan maupun pengobatan (Sutarto, 2021).

Secara umum, efektivitas pemberdayaan dalam rehabilitasi sosial bagi PMKS dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang muncul pada tingkat individu, keluarga, komunitas, dan kelembagaan. Pelaksanaan rehabilitasi berbasis masyarakat dan keluarga memberikan kontribusi signifikan karena melibatkan lingkungan terdekat penerima manfaat sebagai sumber dukungan langsung, meskipun masih terdapat kendala dalam proses dan ketersediaan sumber daya.

Lembaga seperti Pusat Pelayanan Sosial Darurat berperan penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan dasar, perlindungan, rehabilitasi, dan pemberdayaan, termasuk melalui kegiatan keterampilan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kemandirian PMKS. Keseriusan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program penanganan menunjukkan adanya komitmen dalam mendukung proses pemberdayaan, walaupun dampaknya masih terbatas dan membutuhkan penguatan implementasi di lapangan. Strategi yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan guna mengatasi berbagai hambatan yang masih mengurangi efektivitasnya.

PENUTUP

Scoping review ini menunjukkan bahwa pemberdayaan dalam rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan proses multidimensional yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan struktural. Konsep pemberdayaan dalam rehabilitasi sosial menekankan pentingnya pengembangan fungsi peran sosial melalui peningkatan kapasitas individu, terutama bagi penyandang disabilitas mental maupun fisik yang kerap menghadapi hambatan dalam fungsi eksekutif, kognisi sosial, serta kemampuan mengelola emosi. Intervensi pemberdayaan dilakukan melalui pendampingan, pelatihan keterampilan,

rehabilitasi medis dan sosial, serta pembentukan komunitas suportif yang berfungsi sebagai lingkungan belajar dan penguatan keberfungsian sosial.

Pelaksanaan program pemberdayaan dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti dukungan keluarga, peran lembaga layanan sosial, dan kebijakan pemerintah yang progresif. Namun, sejumlah hambatan tetap muncul, termasuk keterbatasan sumber daya, ketidaksesuaian implementasi kebijakan, dan tantangan pada level individu seperti kesulitan adaptasi sosial dan kendala emosional. Meski demikian, dampak pemberdayaan menunjukkan hasil positif berupa peningkatan kemandirian, kemampuan berinteraksi sosial, pemulihan fungsi psikososial, dan meningkatnya kualitas hidup PMKS.

Adapun saran diantaranya :

1. Saran untuk Pemerintah

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang terintegrasi antara sektor sosial, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, sehingga proses pemberdayaan PMKS berjalan komprehensif dari tahap pencegahan, rehabilitasi, hingga reintegrasi sosial.

2. Saran untuk Peneliti

Mengembangkan Kajian tentang Efektivitas Model Pemberdayaan Peneliti perlu melakukan studi longitudinal yang mengevaluasi dampak jangka panjang intervensi pemberdayaan terhadap kemandirian PMKS, termasuk model berbasis komunitas, keluarga, dan intervensi psikososial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Nuraeni, N. O. H. (2021). *Scoping Review: Dampak Cognitive Behaviour Therapy Bagi Pasien Dengan Penyakit Jantung Koroner Yang Mengalami Depresi a Scoping Review: Impact of Cognitive Behavior Therapy for Patients With Coronary Heart Disease With Depression*.
- Aprillia, A., Sugiarti, C., & Aryani, L. (2021). Implementasi Program Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Kabupaten Karawang. *Jipsk*, 6(2), 202–212.
- Aswidiyanto, Y., & Soedjarwo. (2023). Peran Instruktur Dalam Pelatihan Keterampilan Sulam Di Balai Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo. *Instad.Bj*, 04, 16–31.
- Ceja-Vega, M. J., Ruvalcaba-Delgadillo, Y., & Jáuregui-Huerta, F. (2025). Impact of methamphetamine abstinence on social cognition and oxytocin regulation: A study in patients undergoing rehabilitation. *Personalized Medicine in Psychiatry*, 51–52(May). <https://doi.org/10.1016/j.pmip.2025.100156>
- Dinardo, D. (2019). Peran Pekerja Sosial Dalam Program Rehabilitasi Wanita Rawan Sosial Ekonomi Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 1(2), 218–227. <https://doi.org/10.21831/diklus.v1i2.23872>
- Fajar, M. (2022). *Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri*. 2(5).
- Iglesias, A., Fernandez, F., Pulido, J. C., Diaz, C., Qbilat, M., & Pavel, A. (2024). Accessibility Evaluation of an Assistive Social Robotic Platform for Rehabilitation and Its Improvement by Means of Haptic Devices. *Procedia Computer Science*, 239, 1516–1523. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.06.326>
- INDONESIA, M. S. R. (2017). PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR REHABILITASI SOSIAL DENGAN PENDEKATAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL. In *Ekp* (Vol. 13, Issue 3). [file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman AUTP 2017.pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/Pedoman%20AUTP%202017.pdf)
- Murni, R., & Astuti, M. (2015). Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Mental

- Melalui Unit Informasi Dan Layanan Sosial Rumah Kita. *Sosio Informa*, 1(3), 278–292. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i3.170>
- Nagaring, D. D., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Usman (2004:7)*, 1(2), 1–10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/36214/33721>
- Panggabean, W. I., & Jarodi, O. (2023). Analisis Program Rehabilitasi Sosial bagi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 12(02). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19610>
- RAMADHANI, W. S., SULASTRI, S., & NURHAQIM, S. A. (2017). Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (Brskw) Palimanan Kabupaten Cirebon. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 241–245. <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14292>
- Rohman, P. yadhatul, Rusmana, A., & Tungga, Y. E. M. (2025). Resiliensi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Sentra “Antasena” Di Magelang Provinsi Jawa Tengah. *REHSOS: Jurnal Ilmiah Rehabilitas Sosial*, c.
- Salsabila, N., Krisnani, H., & Apsari, N. C. (2019). Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 190. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20496>
- Sutarto. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), 115–135. <https://ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/18>
- Wibhawa, B. (2010). *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial*.
- Widiasih, R., Susanti, R. D., Mambang Sari, C. W., & Hendrawati, S. (2020). Menyusun Protokol Penelitian dengan Pendekatan SETPRO: Scoping Review. *Journal of Nursing Care*, 3(3), 171–180. <https://doi.org/10.24198/jnc.v3i3.28831>